

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

##### 1. Pengertian Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

Political trust merupakan perbuatan maupun sikap yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam konteks politik. Suatu keadaan dimana terjadi kegiatan evaluasi pada pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan dalam aturan administratif (Rawls J, 1971).

Menurut Fukuyama (2005), kepercayaan atau *trust* diartikan sebagai harapan yang timbul dalam masyarakat biasa, jujur, perilaku kooperatif, berdasarkan norma-norma komunal bersama pada bagian dari anggota masyarakat lainnya. Sikap lembaga/institusi dapat dipercaya yang didasari harapan bahwa individu, kelompok, lembaga/institusi yang dipercaya tersebut akan bertindak seperti yang diidealkan atau diharapkan memberi kebaikan di masyarakat.

Political trust merupakan harapan masyarakat (*public expectation*) terhadap seorang pemimpin untuk merespon, mengagresikan serta mengartikulasikan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Kepercayaan yang dimaksud adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah atau sistem politik (Budiarjo, 2008).

Kepercayaan terhadap pemerintah memiliki berbagai istilah lain. Dari berbagai literatur akademik, kepercayaan terhadap pemerintah disebut dengan kepercayaan politik atau *political trust* (Seyd, 2016). Kepercayaan politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah akan mempunyai performa baik (Hardin, 2002).

Menurut (Ivan MA, 2013) dapat dibagi secara makro dan mikro. Kepercayaan politik secara makro (*macro level* atau *organizational trust*) berarti melihat pemerintahan sebagai suatu agregat dan melihat institusi-institusi politik yang ada, sedangkan mikro (*micro level* atau *individual political trust*) berarti melihat pemerintah dalam konteks tokoh politiknya, seperti gubernur, presiden tertentu.

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan politik (*political trust*) merupakan suatu sikap dan perbuatan masyarakat atas respon dari integritas pejabatan maupun sistem politik di suatu wilayah.

## 2. Aspek-aspek Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

Kepercayaan politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah atau wakil rakyat akan dapat mempunyai performa baik. Menurut pendapat Lewicki, (1984) membagi aspek kepercayaan politik (*political trust*) terdiri dari tiga aspek yaitu :

- a. *Ability*, yaitu dikaitkan dengan penampilan individu berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi untuk dipercaya oleh individu yang lain.
- b. *Integrity*, yaitu tindakan yang didasari oleh tingkat kesesuaian prinsip individu di dalam mempercayai orang lain sesuai dengan sifat, keadaan, maupun potensinya.
- c. *Benevolence*, yaitu perilaku seberapa besar individu percaya kepada orang lain untuk berperilaku baik kepadanya.

Tingkat kepercayaan politik pada masyarakat dapat dilihat manakala terjadi suatu keadaan dimana kegiatan evaluasi pada pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan dalam aturan administratif. (Sciffman L dkk, 2010).

Melengkapi pendapat sebelumnya, (Kasperson, 1992) menyatakan bahwa aspek kepercayaan politik terdiri dari empat aspek yaitu meliputi :

- a. *Competent*, merupakan pandangan masyarakat bahwa objek yang dipercaya memiliki kemampuan yang diharapkan.
- b. *Intrinscally commited*, adalah suatu pandangan mengenai komitmen objek yang dipercaya dalam bertindak sesuai dengan kepentingan umum.
- c. *Extrinsically Committed*, merupakan suatu pandangan kepada objek yang berdasarkan dukungan maupun desakan dari masyarakat.
- d. *Predictable*, adalah kondisi objek yang dipandang dari segi keandalan atau kemampuan objek serta sejauh mana dapat berperilaku secara konsisten.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Grimmelikhuijsen & Knies, (2015) membagi aspek kepercayaan polit[i]k menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. *Perceived Competence*, yaitu didefinisikan sebagai sejauh mana keadaan warga negara mempersepsikan pemerintah mampu, efektif, cakap dan profesional dalam bekerja.

- b. *Perceived Benevolence*, didefinisikan sebagai sejauh mana warga negara mempersepsikan pemerintah peduli akan kesejahteraan publik dan termotivasi untuk bertindak atas kepentingan umum.
- c. *Perceived Integrity*, didefinisikan sebagai sejauh mana masyarakat mempersepsikan pemerintah yang tulus, jujur, dan dapat memenuhi janjinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepercayaan politik (*political trust*) meliputi *perceived competence*, *perceived benevolence*, *perceived integrity*, dan *predictable*.

### 3. Indikator Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari teori Grimmelikhuijsen & Knies, (2015) yang membagi kepercayaan politik (*political trust*) kedalam tiga aspek diantaranya *perceived competence*, *perceived benevolence*, dan *perceived integrity* dengan indikator sebagai berikut: (1) *Perceived competence*, yaitu mampu melaksanakan tugas dengan efektif, serta mampu bekerja secara profesional dan cakup; (2) *Perceived benevolence*, yaitu mampu bertindak atas kepentingan umum; (3) *Perceived integrity*, yaitu mampu berperilaku dengan dan mampu menjaga amanah.

### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

Ada beberapa faktor menurut para tokoh yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat terhadap sistem politik maupun pejabat pemerintahan diantaranya :

- a. *Self Interest*, bahwa individu membentuk sikap terhadap politik berdasarkan ketertarikan dan kebutuhan individualnya. Sedangkan keadilan sosial berorientasi pada penilaian menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan keadaan disekitar individu. (Kumlin, 2004)
- b. *Distributive Justice*, (Rawls, 1971) mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan yang berorientasi pada alokasi dan hasil dari sumber daya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
- c. *Procedural Justice*, Keadilan prosedural dapat didefinisikan sebagai kebebasan dan kesamaan yang adil terhadap kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan. Bentuk kebebasan dan kesempatan ini dapat berupa

mekanisme pemilihan umum, mekanisme *check and balances*, serta pelibatan dalam pembuatan kebijakan. (Rawls, 1971).

## B. Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi Terhadap Kasus Korupsi

Banyak para ahli yang mendefinisikan kata persepsi. Desiderato mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman objek, peristiwa atau hubungan – hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau memberikan makna pada stimulus indera. (Rahmat,2005).

Mendukung pendapat sebelumnya, menurut Walgito persepsi merupakan proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. (Walgito.B,2002).

Kemudian Sunaryo memandang persepsi sebagai proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal –hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2002).

Definisi korupsi menurut (Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menurut Syed Hussien Alatas, (2001) dalam bukunya *The Sociology of Corruption* bahwa korupsi bercirikan antara lain : 1) korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya ada persetujuan secara rahasia diantara pegawai yang terkait dengan si pemberi hadiah, dan dikalangan pegawai yang melakukan korupsi ada pengertian tersendiri; 2) pada umumnya korupsi adalah suatu rahasia, kecuali ditempat yang sudah biasa dilakukan dan merajalela serta mengakar, sehingga setiap individu yang melakukan sudah tidak menghiraukan lagi untuk melindungi perbuatan mereka dari khalayak ramai; 3) korupsi melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik bisa berupa uang atau bukan.

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai “penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum” (Alatas, 1987). Korupsi juga melibatkan ketidakjujuran atau tebang pilih dalam penggunaan kekuasaan atau kedudukan yang menyebabkan seseorang atau organisasi mendapatkan keuntungan terhadap yang lain.

Dari pengertian persepsi dan korupsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap korupsi merupakan proses diterimanya informasi baik melalui berbagai macam media yang berisi tentang perilaku korupsi kemudian diproses panca indera sehingga individu atau kelompok mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang perilaku korupsi.

## **2. Aspek-aspek Persepsi Terhadap Korupsi**

Menurut (Allport, 1991) menjelaskan bahwa persepsi meliputi tiga aspek, yaitu : a) Komponen Kognitif adalah komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tertentu; b) Komponen Afektif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi, sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai – nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya; c) Komponen Intepretatif adalah komponen yang berhubungan dengan cara individu memaknai sesuatu yang diterimanya.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, (Walgito, 2002) membagi persepsi kedalam tiga aspek yaitu: a) Kognisi, merupakan aspek yang berhubungan dengan pengenalan akan obyek, peristiwa, hubungan yang diperoleh karena diterimanya suatu rangsangan; b) Afeksi, adalah suatu hal yang berhubungan dengan emosi, aspek ini menyangkut pengorganisasian suatu rangsang yang akan dibedakan kedalam emosi seseorang; c) Konasi, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan kemauan. Aspek ini menyangkut penafsiran suatu rangsang yang menyebabkan individu bersikap dan berperilaku.

Melengkapi pendapat sebelumnya, Ittelson (dalam Bell, 2001) menyatakan bahwa persepsi terdiri dari empat aspek yaitu: a) Kognitif, merupakan suatu proses yang meliputi berpikir mengenai, mengorganisasi dan menyimpan informasi; b) Afektif, adalah suatu perasaan yang dimiliki individu yang mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi sesuatu; c) Intepretatif, yaitu sebuah cara bagaimana individu memaknai sesuatu; d) Evaluatif, diartikan sebagai upaya individu dalam menilai sesuatu sebagai aspek yang baik dan buruk.

### 3. Indikator Persepsi Terhadap Korupsi

Indikator persepsi terhadap korupsi dalam penelitian ini diambil dari teori Ittelson (dalam Bell, 2001) yang membagi aspek harga diri menjadi empat aspek, yaitu kognitif, afektif, interpretatif, dan evaluatif. Berdasarkan aspek diatas dibagi menjadi beberapa indikator yaitu : (1) kognitif, indikator dalam aspek ini adalah mengetahui adanya kasus korupsi; (2) afektif, indikator dalam aspek ini adalah merasa kecewa, merasa malu dan merasa kecewa; (3) interpretatif, indikator dalam aspek ini adalah memahami bahwa anggota DPRD tidak jujur, memahami bahwa anggota DPRD bersifat tamak, dan memahami bahwa anggota DPRD mempunyai gaya hidup konsumtif ; (4) evaluatif, indikator dalam aspek ini adalah tindakan yang melanggar norma dan aturan, tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, dan adanya tujuan kepentingan pribadi atau golongan.

### 4. Macam – macam Persepsi

Menurut Walgito, (2002) bahwa persepsi dibagi menjadi dua macam yaitu persepsi positif dan negatif. Dalam konteks persepsi terhadap korupsi dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Persepsi Positif

Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan. Dalam konteks persepsi terhadap korupsi, individu tetap merasa puas dengan kondisi demikian sekalipun terjadi perilaku korupsi yang diketahuinya

#### b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang dipersepsikan. Dalam konteks persepsi terhadap korupsi, individu cenderung tidak puas dan tidak menyetujui perilaku korupsi yang diketahuinya.

## 5. Dampak Persepsi Terhadap Korupsi

Salah satu dampak persepsi terhadap korupsi pada masyarakat yaitu rendahnya kepercayaan politik (*political trust*). Ada beberapa dampak kepercayaan politik yang rendah diantaranya: a) Menurunnya partisipasi politik, diantara bentuk partisipasi politik menurut Damsar, (2010) adalah mengikuti berbagai macam kegiatan pemilu, forum diskusi, kampanye calon dan lain sebagainya. Hal paling penting dalam partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilu, menurut hasil survey LSI Denny JA yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa angka golput meningkat cukup tajam dari pemilu legislatif 2019 sebesar 30,05% dibanding pemilu legislatif tahun 2014 sebesar 24,00%; b) Kualitas sistem demokrasi rendah (*low quality democracy*), Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik masyarakat, sebab partisipasi merupakan hal penting dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi di suatu negara. Absennya masyarakat dalam partisipasi politik berdampak pada keputusan dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut membuat tidak adanya kontrol, menentukan isi keputusan, mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan politik, (Hungtinton dan Nelson, 2004); c) Gerakan sosial (*social movement*), menurut (Locher, 2002) gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan solidaritas serupa, dalam konteks konfrontatif melawan kelompok elite, pemerintahan, atau penguasa. Apabila harapan masyarakat (*public expectation*) terhadap pemerintahan rendah, maka gerakan massa dan aksi solidaritas akan bermunculan dari berbagai elemen masyarakat (Samaloisa, 2009).

## 6. Hubungan Persepsi Terhadap Korupsi dengan Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

Dalam penelitian (Hamdi Muluk, 2017). Menjelaskan bahwa persepsi merupakan faktor psikologis yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam hal ini kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat, sebagaimana pendapat dari (Morton dkk, 1984) bahwa perilaku dipengaruhi oleh keyakinan atau persepsi individu terhadap norma sosial untuk melakukan atau tidak perilaku yang akan membentuk intensi atau minat dengan tujuan perilaku tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang diawali dengan masuknya informasi ke dalam memori manusia melalui panca indera yang kemudian memberikan tanggapan serta

informasi terhadap suatu objek sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku individu.

### C. Kerangka Berpikir

Masyarakat merupakan elemen penting dalam keberlangsungan negara yang menganut sistem demokrasi, banyaknya kabar dan informasi mengenai pejabat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi dari masa ke masa ditambah dengan pengetahuan masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi perlahan membentuk persepsi negatif terhadap kasus korupsi itu sendiri. Persepsi negatif masyarakat terhadap korupsi terbentuk berdasarkan beberapa aspek di dalamnya yang meliputi : a) Kognitif, merupakan suatu proses berpikir atas stimulus berupa informasi mengenai korupsi; b) Afektif, adalah suatu perasaan yang timbul ketika mengetahui kasus korupsi yang ada; c) Intepretatif, yaitu sebuah cara bagaimana individu memaknai kasus korupsi yang terjadi; d) Evaluatif, lebih diartikan sebagai upaya individu dalam menilai kasus korupsi yang terjadi.

Dampak persepsi terhadap kasus korupsi yang negatif dapat membuat menurunnya kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat yang berdampak pula terhadap partisipasi politik, menurunnya kualitas demokrasi, serta gerakan sosial (*social movement*). Karena rendahnya kepercayaan politik (*political trust*) disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi. Oleh karena itu perlu ditekankan pentingnya anggota DPRD mempunyai sifat kejujuran, integritas, dan anti korupsi agar tetap dapat menjaga kepercayaan politiknya

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi di suatu negara. Partisipasi masyarakat dalam dunia politik berdampak pada keputusan dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut berfungsi sebagai kontrol, menentukan isi keputusan, mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan politik para pejabat pemerintah. Kinerja dan integritas pejabat pemerintahan dalam hal ini DPRD berdampak pula pada kepercayaan politik (*political trust*) terhadap masyarakat.

Gambaran kepercayaan politik (*political trust*) yang baik adalah ketika harapan yang timbul pada tokoh dan institusi politik dapat disesuaikan dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat itu sendiri seperti bertindak jujur, berperilaku kooperatif, serta mementingkan kepentingan rakyat dapat terpenuhi. Masyarakat menganggap bahwa integritas DPRD sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi tingkat kepercayaan politik, sehingga sebagian besar masyarakat berharap dapat mempunyai wakil rakyat dengan kriteria demikian. Hal ini juga didukung dengan banyaknya masyarakat yang merasa kecewa dan malu dengan kasus tindak korupsi yang menjerat para anggota DPRD. Dengan keadaan tersebut menandakan bahwa kejujuran, kepentingan rakyat maupun integritasnya dinilai cukup buruk.

Masyarakat yang memiliki kepercayaan politik (*political trust*) yang tinggi akan mampu mendukung kinerja dari DPRD dengan meningkatkan berbagai macam partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, lobby, dan contacting. Hal tersebut terjadi karena dampak dari persepsi masyarakat terbangun dengan baik (Budiarjo, 2009).

Seorang anggota DPR harus menunjukkan kinerja, integritas serta dapat menjaga tanggung jawab, sehingga persepsi masyarakat terhadap lembaga DPR menjadi baik. Faktor tersebut yang dapat mempengaruhi kepercayaan politik (*political trust*) pada masyarakat. Masyarakat yang rendah *trust* atau kepercayaan terhadap lembaga DPR juga dapat mempengaruhi kinerjanya, dalam *political trust* harus terjadi hubungan timbal balik. Jika lembaga DPR dapat menjaga amanahnya persepsi masyarakat pun akan terbentuk baik, hal tersebut juga membuat *political trust* pada masyarakat terbangun dengan baik pula. Penjelasan tersebut dapat menjelaskan terdapat hubungan variabel persepsi terhadap korupsi dengan variabel kepercayaan politik (*political trust*)

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ada hubungan negatif antara persepsi terhadap korupsi dengan kepercayaan politik (*political trust*), semakin tinggi persepsi negatif terhadap korupsi maka semakin rendah kepercayaan politik (*political trust*), dan sebaliknya semakin rendah persepsi negatif terhadap korupsi maka semakin tinggi pula maka semakin tinggi kepercayaan politik (*political trust*).